

Implikasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan terhadap Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean terhadap Barang Impor = Implications of Article 17 of Law Number 17/2006 on Customs for the Re-determination of Tariffs and Customs Values on Imported Goods

Flora Kristiani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920565478&lokasi=lokal>

Abstrak

Penetapan kembali tarif dan nilai pabean yang dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006) memiliki masalah hukum. Rumusan Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2006 tidak memberikan penjelasan secara jelas dan mendetail atas diksi “kembali” sehingga menimbulkan kebingungan bagi pengguna jasa dan hakim dalam putusannya. Permasalahan hukum dapat dilihat dari adanya keberatan dan gugatan oleh pengguna jasa di Pengadilan Pajak maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). SPKTNP dianggap merupakan penetapan yang wajib didahului dengan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 17 Tahun 2006. Selain itu “klik” dalam proses importasi seharusnya dapat dimaknai sebagai penetapan elektronik yang menggantikan SPKTNP.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna dari penetapan kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2006 serta mengetahui dan menganalisis persetujuan melalui sistem yang dapat dipersamakan dengan SPTNP yang dikeluarkan oleh Pejabat BC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU No. 17 Tahun 2006. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini difokuskan kepada pemaknaan frasa penetapan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2006 dengan melihat pemaknaan dari sisi Pengguna Jasa, Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak, TUN dan MA, pemaknaan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SPKTNP tidak mutlak harus didahului dengan SPTNP karena objek penelitian dari SPKTNP tidak hanya SPTNP, dan tindakan Pejabat BC berupa “klik” pada sistem merupakan tindakan faktual yang dapat berakibat hukum dan hasil dari tindakan “klik” dapat disamakan dengan penetapan Pejabat BC. Penelitian ini memberi saran untuk dilakukan sosialisasi secara berkala kepada pengguna jasa, para Hakim terkait diksi kata “kembali” pada SPKTNP sesuai Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2006 dan perlu mengakomodir ketentuan mengenai tindakan pejabat secara elektronik seperti “klik” pada sistem yang dapat menghasilkan penetapan elektronik/digital tanpa penerbitan penetapan dalam bentuk tertulis diatas kertas.The re-determination of customs tariffs and values as outlined in the Letter of Re-determination of Customs Tariffs and Values (SPKTNP) issued by the Director General of Customs and Excise as stipulated in Article 17 of Law No. 17 of 2006 concerning Amendments to Law No. 10 of 1995 concerning Customs (Law No. 17 of 2006) has legal problems. The formulation of Article 17 of Law No. 17 of 2006 does not provide a clear and detailed explanation of the diction “return”, causing confusion for service users and judges in their decisions. Legal problems can be seen from objections and lawsuits by service users at the

Tax Court and State Administrative Court (PTUN). SPKTNP is considered a stipulation that must be preceded by a Customs Tariff and Value Determination Letter as stipulated in Article 16 of Law No. 17 of 2006. In addition, “click” in the importation process should be interpreted as an electronic determination that replaces SPKTNP.

This research aims to analyze the meaning of re-determination as referred to in Article 17 of Law No. 17 of 2006 and to determine and analyze the approval through a system that can be equated with SPTNP issued by BC Officials as referred to in Article 16 of Law No. 17 of 2006. The problems raised in this research are focused on the meaning of the phrase re-determination as stipulated in Article 17 of Law No. 17 of 2006 by looking at the meaning from the side of Service Users, Judges in Tax Court Decisions, Administrative Court and Supreme Court, meaning based on Law No. 17 of 2006 This research uses doctrinal research methods. This research concludes that SPKTNP does not absolutely have to be preceded by SPTNP because the research object of SPKTNP is not only SPTNP, and the action of BC Officials in the form of “clicking” on the system is a factual action that can have legal consequences and the results of the “click” action can be equated with the determination of BC Officials. This research provides suggestions for periodic socialization to service users, judges related to the diction of the word “back” in SPKTNP in accordance with Article 17 of Law No. 17 of 2006 and needs to accommodate provisions regarding electronic official actions such as “clicking” on a system that can produce electronic/digital determinations without issuing determinations in written form on paper.